

ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Retno Wilis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
Jl. Adi Sucipto Nomor 28 Banyuwangi
re.wilis@yahoo.com

Abstract

This study analyzes the influence of the minimum wage, investment and government spending on educated employment, trained employment and uneducated and untrained employment in 38 Regencies/Cities of East Java Province in 2008–2013. The research is using quantitative approach, panel data analysis and Fixed Effect Model (FEM) method. The results show that the minimum wage variable has negative significant effect on the educated employment, trained employment and uneducated and untrained employment. Regional investment variable does not significantly affect to the educated employment, trained employment and uneducated and untrained employment. Domestic investment variable has positive significant effect on the trained employment, but does not significantly affect to the educated employment and uneducated and untrained employment. Foreign investment variable does not significantly affect to the educated employment, trained employment and uneducated and untrained employment. And government spending variable has positive significant effect on the educated employment and uneducated and untrained employment, but does not significantly affect to the trained employment.

Keywords: minimum wage, regional investment, domestic investment, foreign investment, government spending, employment

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam beberapa dasawarsa ini, keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius (Sukirno, 2013). Angka pengangguran masih saja tinggi terjadi karena adanya pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum. Sebab lain adalah banyaknya pencari kerja dengan tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja (Dimas dan Nenik, 2009).

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja (Dornbusch, Fisher, and Startz, 2008; Taggart, *et al.*, 2000). Heilbroner (1982) menyatakan pengeluaran pemerintah merupakan suatu cara untuk menggerakkan permintaan yang dapat memompa suatu perekonomian yang sedang tertekan dan memulihkan tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Sedangkan dampak dari kenaikan permintaan investasi akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan mampu meningkatkan terciptanya kesempatan kerja baru sebagai akibat adanya peningkatan pendapatan dan permintaan *output* dalam masyarakat (House dan Shapiro, 2005 dalam Mankiw, 2007).

Dalam penelitian Astuti (2007) tentang analisis investasi, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja mengindikasikan terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi terhadap kesempatan kerja. Sementara kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja. Dimas dan Woyanti (2009) dalam penelitiannya tentang penyerapan tenaga kerja menyatakan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja, faktor upah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil yang terakhir tidak sesuai dengan teori, karena kebanyakan investor lebih menggunakan padat modal daripada padat karya. Menurut Afiat (2012) dalam penelitiannya tentang pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan perubahan struktur terhadap penyerapan tenaga kerja menyatakan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui perubahan struktur ekonomi.

Modal sumber daya manusia dianggap sebagai faktor penting dalam teori pertumbuhan ekonomi modern (Lucas, 1998; Romer, 1989; Galor and Well, 2000

dalam Zanden and Mark, 2012). Pendidikan merupakan salah satu modal sumber daya manusia.

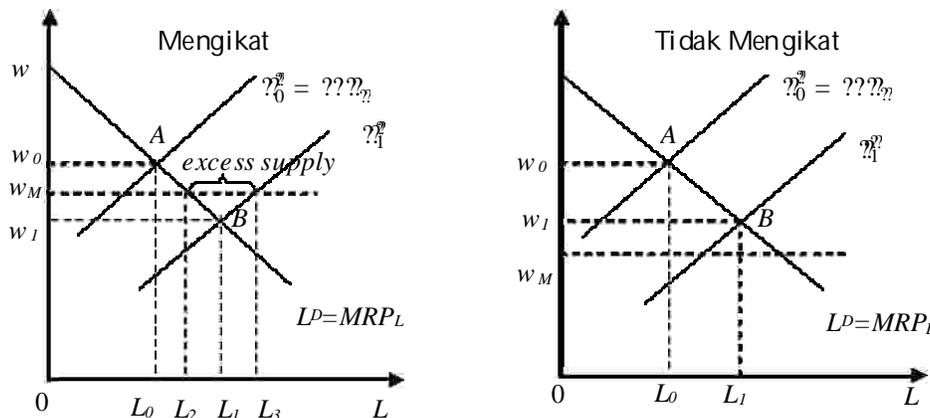
Dengan membandingkan data empiris BPS Nasional dan BPS Provinsi Jawa Timur selama periode 2008 hingga 2013 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang tidak pernah sekolah, tidak/belum tamat SD dan pendidikan tertinggi SD lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Nasional. Sedangkan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP, SMU, SMK, Diploma I/II/III/Akademi, dan Universitas lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dibandingkan tingkat Nasional.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh upah minimum, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya. Dengan kata lain, upah yang dibayarkan tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum. Tujuan utama dari kebijakan upah minimum adalah untuk melindungi pekerja dari rendahnya tingkat upah, terutama pada saat tingkat penawaran tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat upah tidak akan terus mengalami penurunan.



Gambar 1. Kebijakan Upah Minimum yang Mengikat dan Tidak Mengikat

Sumber: Santoso, 2012

Pada kasus di mana tidak ada arbitrase, tingkat keseimbangan upah terjadi pada saat w_0 dan kesempatan kerja sebanyak L_0 . Adanya kenaikan penawaran tenaga kerja digambarkan dengan pergeseran kurva penawaran tenaga kerja ke kanan dari L_0^s menjadi L_1^s . Jika kenaikan penawaran ini dibiarkan terus maka akan berpotensi menurunkan tingkat upah sampai pada w_1 . Untuk mencegah penurunan lebih lanjut, pemerintah dapat menetapkan tingkat upah di atas w_1 yaitu sebesar w_M . Artinya upah paling rendah yang masih diperbolehkan adalah sebesar w_M . Oleh karena tingkat upah minimum lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan maka kebijakan upah minimum ini disebut mengikat. Pada kondisi kebijakan mengikat seperti ini menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, L_3 , lebih besar daripada jumlah yang diminta, L_2 . Dengan demikian akan terjadi pengangguran sejumlah L_2L_3 . Akibatnya alokasi di dalam pasar tenaga kerja tersebut menjadi tidak efisien karena $MRP_L \neq MC_L$.

Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Todaro (2000) menyatakan besar atau kecilnya dampak-dampak positif dari penghapusan berbagai distorsi atas harga-harga faktor produksi terhadap tingkat pertumbuhan kesempatan kerja juga ditentukan oleh sejauh mana tenaga kerja dapat disubstitusikan (dapat saling dipertukarkan) dengan modal dalam berbagai proses produksi industri di negara-negara berkembang. Para ekonom menyebut kemungkinan pertukaran tersebut dengan istilah elastisitas substitusi faktor (*elasticity of factor substitution*), yaitu rasio persentase perubahan dalam proporsi penggunaan tenaga kerja terhadap modal (rasio tenaga kerja-modal atau rasio L/K) dibandingkan dengan rasio atas persentase perubahan harga modal relatif terhadap tenaga kerja (P_K/P_L). Secara matematis elastisitas substitusi dapat dirumuskan secara

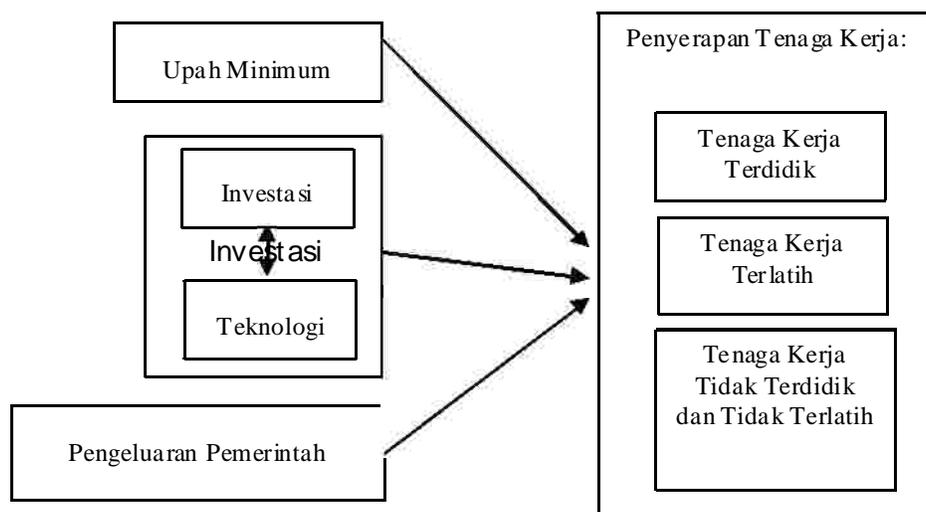
seederhana sebagai berikut:
$$h_{LK} = \frac{d\left(\frac{L}{K}\right)\left(\frac{L}{K}\right)}{d\left(\frac{P_K}{P_L}\right)\left(P_K/P_L\right)}$$

Elastisitas substitusi yang tinggi merupakan suatu indikasi bahwa perubahan harga faktor produksi mempunyai dampak yang besar terhadap tingkat dan kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi. Perubahan harga faktor produksi merupakan sarana yang sangat penting guna meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan untuk menyingkirkan distorsi harga faktor produksi mempunyai peranan yang benar-benar penting dalam penyusunan strategi pembangunan yang berorientasikan pada penyediaan lapangan kerja.

Pengeluaran Pemerintah dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan anggaran (fiskal) diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri, tenaga kerja dalam

negeri, dan mengembangkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini para produsen dalam negeri diberi rangsangan fiskal agar menggunakan teknologi produksi padat karya, dan bila perlu diberikan proteksi terhadap persaingan dengan luar negeri (Subandi, 2012). Salah satu fungsi pokok kebijakan anggaran belanja negara adalah fungsi stabilisasi. Termasuk ke dalam fungsi stabilisasi ialah tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Reksoprayitno, 2009).



HIPOTESIS

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. (2) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. (3) Ada pengaruh upah minimum, investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional variabel sebagai berikut: (1) Upah minimum adalah upah yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Upah Minimum Kabupaten/Kota), yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (2) Investasi adalah realisasi jumlah nilai investasi yang dilakukan melalui penyertaan modal (investasi) daerah

Kabupaten/Kota, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (3) Pengeluaran Pemerintah adalah realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) setiap tahun yang tertuang dalam APBD, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. (4) Penyerapan tenaga kerja terdidik adalah jumlah penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi/Universitas, yang dinyatakan dalam satuan orang. (5) Penyerapan tenaga kerja terlatih adalah jumlah penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma/Akademi, yang dinyatakan dalam satuan orang. (6) Penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah jumlah penduduk bekerja yang tidak/belum pernah sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang dinyatakan dalam satuan orang.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian menggunakan data panel yang merupakan gabungan data *cross section* berjumlah 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan data *time series* tahun 2008–2013. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), realisasi investasi yang terdiri dari Penyertaan Modal (investasi) Daerah, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten/Kota, dan realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota (realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta sumber-sumber data lain yang relevan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data panel, yaitu:

Common Effect Model/Model tanpa Efek Individu

Menurut Baltagi (2005), model tanpa efek individu (*common effect*) adalah metode pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan *OLS* (*ordinary least square*) untuk menduga parameternya. Metode *Ordinary Least Square* atau yang dikenal dengan metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode yang populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linier. Model *common effect* ini mempunyai

intersep α dan slope β yang sama untuk setiap individu, sehingga efek individu tidak akan terlihat

Fixed Effect Model/Model Efek Tetap

Menurut Baltagi (2005), pada pendekatan model efek tetap, diasumsikan bahwa intersep (α) dan slope (β) dari persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit *cross section* maupun antar unit *time series*. Satu cara untuk memperhatikan unit *cross-section* atau unit *time-series* adalah dengan memasukkan variabel boneka/semu (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit *cross-section* maupun antar unit *time series*. Pendekatan *fixed effect* menggunakan variabel *dummy* untuk mengestimasi perbedaan intersep sehingga disebut juga model *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

Random Effect Model/Model Efek Random

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) pada *Random Effect Model* perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi lewat *error* dari model. Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan *error* yaitu individu dan waktu, maka *random error* pada *Random Effect Model* juga perlu diurai menjadi *error* untuk komponen individu, *error* untuk komponen waktu dan *error* gabungan.

Dalam menduga model dari data panel, terdapat tiga kemungkinan model yang dihasilkan. Untuk mengetahui model mana yang paling tepat dari ketiga kemungkinan yang ada dapat digunakan statistik uji *Chow* dan *Hausman*.

Setelah pemilihan metode dan pembentukan model regresi dilakukan, maka selanjutnya perlu diuji kelayakan suatu model dalam menguji hipotesis yang diajukan. Menurut teorema *Gauss Markov* untuk melihat apakah hasil regresi sudah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), maka perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan model *Pooled Regresion*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* serta Uji *Chow* dan *Hausman* untuk pemodelan tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik "Fixed Effect Model" untuk Tenaga Kerja Terdidik

Tabel 1. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM) untuk Tenaga Kerja Terdidik

Variabel	Koefisien β	t_{hitung}	Signifikan	Keterangan
Konstanta	99.430,81	20,728	<0,001	Signifikan
UMK	-0,017	-2,567	0,011	Signifikan
PM Daerah	$6,59 \times 10^{-9}$	0,064	0,949	Tidak Signifikan
PMDN	$1,04 \times 10^{-9}$	1,116	0,266	Tidak Signifikan
PMA	$1,12 \times 10^{-9}$	1,474	0,142	Tidak Signifikan
PP	$9,67 \times 10^{-9}$	3,216	0,002	Signifikan
R square		= 0,990		

Dari hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik adalah upah minimum kabupaten/kota (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_5). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Sedangkan variabel bebas penyertaan modal daerah (X_2), PMDN (X_3) dan PMA (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik pada taraf nyata $\alpha = 0,05$.

Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik "Fixed Effect Model" untuk Tenaga Kerja Terlatih

Tabel 2. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM) untuk Tenaga Kerja Terlatih

Variabel	Koefisien β	t_{hitung}	Signifikan	Keterangan
Konstanta	56.559,27	14,916	<0,001	Signifikan
UMK	-0,026	-5,060	<0,001	Signifikan
PM Daerah	$8,43 \times 10^{-8}$	1,039	0,300	Tidak Signifikan
PMDN	$2,22 \times 10^{-9}$	3,024	0,003	Signifikan
PMA	$3,76 \times 10^{-10}$	0,627	0,532	Tidak Signifikan
PP	$3,02 \times 10^{-9}$	1,272	0,205	Tidak Signifikan
R square		= 0,912		

Dari hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih adalah upah minimum kabupaten/kota (X_1) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (X_3). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Sedangkan variabel bebas penyertaan modal daerah (X_2), PMA (X_4) dan pengeluaran pemerintah (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih pada taraf nyata $\alpha = 0,05$.

Pengujian Hipotesis dengan Model Terbaik "Fixed Effect Model" untuk Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tabel 3. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM) untuk Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Variabel	Koefisien β	t _{hitung}	Signifikan	Keterangan
Konstanta	364.482,8	24,696	<0,001	Signifikan
UMK	-0,052	-2,605	0,010	Signifikan
PM Daerah	$2,19 \times 10^{-7}$	0,693	0,489	Tidak Signifikan
PMDN	$3,04 \times 10^{-9}$	1,060	0,290	Tidak Signifikan
PMA	$1,60 \times 10^{-9}$	0,683	0,496	Tidak Signifikan
PP	$2,30 \times 10^{-8}$	2,482	0,014	Signifikan
R square		= 0,953		

Dari hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah upah minimum kabupaten/kota (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_5). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari taraf nyata $\alpha = 0,05$. Sedangkan variabel bebas penyertaan modal daerah (X_2), PMDN (X_3), dan PMA (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih pada taraf nyata $\alpha = 0,05$.

Ketiga pemodelan regresi panel di atas telah memenuhi asumsi-asumsi: kenormalan galat, kehomogenan varians galat, kebebasan antar galat pengamatan serta non multikolinieritas, sehingga ketiga pemodelan regresi tersebut memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih, penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hubungan negatif antara tingkat upah dengan penyerapan tenaga kerja menunjukkan kesesuaian teori yang selama ini berlaku. Berdasarkan Aturan Hick-Marshall dalam Santoso (2012), jika upah meningkat maka total biaya produksi akan mengalami peningkatan secara proporsional lebih tinggi. Sebagai konsekuensinya, tingkat harga barang juga meningkat lebih tinggi sehingga kuantitas barang yang diminta juga akan mengalami penurunan lebih tinggi, maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Simanjuntak (1985), upah dipandang sebagai beban oleh pengusaha, karena semakin besar tingkat upah akan semakin kecil proporsi keuntungan yang dinikmati pengusaha. Oleh karena itu, kenaikan upah akan direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jumlah tenaga kerja.

Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih. Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Harrod Domar, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Selain itu juga, penelitian ini mendukung teori Partowidagdo (1999) yang mengemukakan bahwa investasi dengan sendirinya berkaitan secara langsung dengan terciptanya lapangan kerja. Dengan terbukanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat sehingga angka pengangguran menjadi rendah. Sandi (1985) menyatakan bahwa salah satu faktor penunjang pembangunan sektor industri adalah tenaga kerja terampil (terlatih) dalam industri yang bersangkutan.

Penyertaan modal daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut KSAP (2008), pengelolaan dana bergulir yang dilakukan selama ini terdapat permasalahan yaitu belum dilaksanakan sesuai dengan praktek manajemen yang sehat sehingga tidak dapat diketahui jumlah dana bergulir yang beredar, berpotensi kembali dan berpotensi macet. Penyebab lain dikarenakan instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat penyaluran dana bergulir pertama sekali dan beranggapan bahwa dana bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tahun Anggaran 2011 s.d. 2013 bahwa terdapat dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih pada PT. BPD Jawa Timur. Kasus tersebut seperti pemberian fasilitas kredit modal kerja dan pemberian plafon kredit yang melebihi batas nilai maksimum plafon tidak sesuai dalam pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kewajiban debitur atas pokok dan bunga kredit. Selain itu, pemantauan, penyelaamatan, dan penyelesaian agunan terhadap kredit macet atau bermasalah belum dilakukan. Selanjutnya, BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), yaitu porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPR, realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target, serta BPR dan pihak terkait tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian RKT BPR untuk memberikan kredit dan mendorong perekonomian usaha kecil. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lalai mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor di BPR dalam suatu aturan tertulis serta memenuhi setoran modal dasar.

Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih, penyerapan

tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur bahwa pada tahun 2008 Penanaman Modal Asing (PMA) memprioritaskan pada sektor perdagangan sebesar 58,78%, dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memprioritaskan pada sektor industri. Bahkan pada tahun 2013 mencapai 95,03%. Untuk kondisi tenaga kerja di Jawa Timur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri berada di bawah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 memprioritaskan di sektor industri, bahkan pada tahun 2013 mencapai 94,22 persen dari total PMDN. Untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri berada di bawah sektor pertanian dan sektor perdagangan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori Keynes dalam Dumaury (1997), mengungkapkan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih. Pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanjakan untuk tenaga kerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pelayanan umum di tahun 2008 dan 2009, sedangkan di tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada fungsi pendidikan. Di Jawa Timur terdapat 258 Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki bidang keahlian pariwisata sedangkan berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pengeluaran pemerintah fungsi pariwisata dan budaya memiliki persentase terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memberikan perhatian dan dukungan dengan menyediakan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Variabel upah berpengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengaruh negatif dari upah minimum sangat dirasakan oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang merupakan mayoritas dari pekerja di Jawa Timur.

Variabel penyertaan modal daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan karena terdapat piutang/pinjaman dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih pada pemerintah daerah maupun pada PT. BPD Jawa Timur, dan BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK).

Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih, karena tenaga kerja terlatih merupakan salah satu penunjang pembangunan sektor industri dalam industri yang bersangkutan. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, disebabkan persentase terbesar PMDN memprioritaskan di sektor industri, sedangkan tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik, penyerapan tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini disebabkan persentase terbesar PMA memprioritaskan di sektor industri, sedangkan tenaga kerja Jawa Timur didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik serta penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah sangat dirasakan oleh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terlatih, hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berupa belanja pegawai untuk tenaga kerja terlatih sebagian besar dibelanjakan untuk tenaga kerja pendidik dan tenaga kerja kesehatan dengan pendidikan minimal Diploma. Sedangkan, pengeluaran pemerintah terbesar pada fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan umum. Selain itu juga, pengeluaran pemerintah fungsi pariwisata dan budaya merupakan persentase terendah sehingga pemerintah kurang memberikan perhatian dan dukungan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan SMK bidang pariwisata.

Saran

Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan terutama terkait dengan penciptaan kesempatan kerja, kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja dan pengupahan, karena pemerintah daerah perlu mengatasi masalah ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengorbankan kepentingan pengusaha.

Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah maupun Bank Pembangunan Daerah untuk mengatasi masalah dana bergulir yaitu: (1) Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui penerima dana bergulir, besar dana yang telah disalurkan, jatuh tempo dana yang disalurkan, jumlah dana yang telah dibayarkan, dan sisa dana yang belum dibayarkan. (2) Identifikasi penerima dana bergulir. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui kondisi penerima dana bergulir bisa ditagih atau tidak bisa ditagih dengan alasan, antara lain: kelompok bubar, pindah alamat, meninggal, gulung tikar, dan lain-lain. (3) Variabel penyertaan modal daerah (investasi non permanen/dana bergulir) belum sepenuhnya dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja, diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur memberikan anggaran kepada SKPD terkait untuk pengelolaan dan pemantauan dana yang sedang beredar di masyarakat. (4) Pemerintah daerah dalam membuat kebijakan tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sehubungan dengan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), di mana Kepala Daerah selaku pemilik modal berkoordinasi khususnya dalam hal mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor dan memenuhi setoran modal dasar. (5) Diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu wajib belajar 12 tahun dengan melaksanakan pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah secara efektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih menjadi tenaga kerja terdidik maupun tenaga kerja terlatih terutama bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan bidang industri agar para tenaga kerja mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah. Pada akhirnya menarik minat para investor untuk menanamkan modal, baik dalam bentuk PMDN maupun PMA di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dan realisasi investasi lebih merata serta padat karya yang tidak hanya memprioritaskan pada bidang industri. (6) Pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja terlatih lulusan SMK, sehingga mereka tidak perlu keluar daerah untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. (7) Bagi para peneliti lanjutan, berdasarkan kelemahan-kelemahan hasil penelitian ini maka para peneliti lanjutan dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja serta memberikan indikator-indikator yang spesifik untuk masing-masing variabel agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dari pengaruh masing-

masing variabel serta para peneliti lanjutan diharapkan dapat menambahkan periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiat, M.N. 2012. *Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Astuti, E. 2007. *Analisis Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Propinsi Nusa Tenggara Barat*, Tesis, Program Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013. *Buku I Ringkasan Eksekutif*. Jakarta
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd Edition. John Wiley and Sons Ltd. Chichester.
- Dimas dan Nenik, W. 2009. Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol. 16.No. 1. Hal. 32–41.
- Dornbusch, R., S. Fischer, and R. Startz. 2008. *Macroeconomics*, 10th Edition. Mirazudin, Roy Indra (penerjemah). Makroekonomi. Edisi Kesepuluh. PTMedia Global Edukasi.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Heilbroner, R.L. 1982. *The Making of Economic Society*, 6th edition. Diajung, Sutan (penerjemah). Terbentuknya Masyarakat Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir*. Jakarta
- Mankiw, N.G. 2007. *Macroeconomics*, 6th Edition. Liza, Fitria dan Imam Nurmawan (penerjemah). Makroekonomi. Edisi Keenam. Erlangga.
- Nachrowi, D.N., dan Hardius, U. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFEUI.
- Partowidagdo, W. 1999. *Memahami Analisis Kebijakan*. Bandung: Program Studi Pembangunan Pasca Sarjana ITB.
- Reksoprayitno, S. 2009. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Enam. Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Sandi, I.M. 1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari.
- Santoso, R.P. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Simanjuntak, P.J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subandi. 2012. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Sukimo, S. 2013. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana.
- Taggart, D.Mc., Christoper, F., and Michael, P. 2000. *Macroeconomics*. Addison-Wesley.
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development*, 7th Edition. Munandar, Haris (penerjemah). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.

Zanden, J.L.V., and Marks, D. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.